

DAFTAR PUSTAKA

- Andaru, Dimas, and Sulistio Adiwinarto. "Pembuktian Tidak Sederhana Kepailitan Pengembang Apartemen Di Dalam SEMA 3 Tahun 2023." *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 1 (2025): 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4555>.
- Aslam, Annisa Paramaswary. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. 3rd ed. Tahta Media Group, 2023.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Edited by Jakarta. 2nd ed. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Event, Labiru. "Jelajahi Beragam Jenis Developer Perumahan Berdasarkan Properti Yang Dibangun." Labiruevent.com, 2024. <https://labiruevent.com/jenis-developer-perumahan/>.
- Francis, Teddy, and Ariawan. "Akibat Hukum Bagi Pemilik Satuan Rumah Susun Terhadap Developer Rumah Susun Yang Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga." *Jurnal Haluan Adigama* 3, no. 2 (2021): 1260–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/adigama.v3i2.10613>.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Edited by Tarmizi. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hasan, Maya. "Butuh Dana Rp400 Miliar, Perumnas Tak Sanggup Biayai Revitalisasi Rumah Susun 24 Lir." *Kantor Berita RMOL Sumsel Republik Merdeka*, 2024. <https://www.rmolsumsel.id/butuh-dana-rp400-miliar-perumnas-tak-sanggup-biayai-revitalisasi-rumah-susun-24-ilir>.
- HR., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Revisi 11. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Huda, Ni'matul, and R. Nazriyah. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. 1st ed. Bandung: Nusa Media, 2017.

Hukumonline, Tim Publikasi. "Pemerintah, Akademisi, Dan Konsultan Hukum Bahas Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang." *Hukumonline*, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah--akademisi--dan-konsultan-hukum-bahas-penyelesaian-sengketa-utang-piutang-lt64867cba73549/>.

Ibrahim, Helmi, Hendri, and Serlika Aprita. "Penerapan Asas Keadilan Bagi Konsumen Yang Tidak Dapat Memohon Pailit Dan PKPU Kepada Developer Apartemen Atau Rumah Susun Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2024): 147. <https://doi.org/10.32502/khdk.v6i2.9100>.

Inc., Faaz. "Apa Itu Developer Properti? Perannya Dalam Industri Real Estate." *Faazinc.com*, 2024. <https://www.faazinc.com/blog/apa-itu-developer-properti/>.

Indonesia, Tim Kurator PT Adara Properti. "Pengumuman Putusan Pailit Dan Undangan Rapat Kreditor PT Adara Properti Indonesia (Dalam Pailit)," 2024. <https://share.google/Olat9iOuuIVfFKpPp>.

Irfani. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/JLI.V17I3.711>.

KAI, Redaksi. "Meninjau Edaran MA Tentang Pembuktian Sederhana Pailit/PKPU Pengembang Apartemen." *Kongres Advokat Indonesia*, 2024. <https://www.kai.or.id/berita/hukum/23595/meninjau-edaran-ma-tentang-pembuktian-sederhana-pailit-pkpu-pengembang-apartemen.html>.

kumparanBISNIS. "Mau Setop Bangun Rumah Tapak Di Kota, Pemerintah Akan Beri Insentif Ke Rusun." *Kumparan*, 2025. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/mau-setop-bangun-rumah-tapak-di-kota-pemerintah-akan-beri-insentif-ke-rusun-25EXToefZvw>.

Kurniawan, Didi. "Kemenko Perekonomian: Sektor Properti Mainkan Peran Penting Gerakkan Ekonomi Nasional." *VOI*, 2025.

<https://voi.id/ekonomi/484251/kemenko-perekonomian-sektor-properti-mainkan-peran-penting-gerakkan-ekonomi-nasional>.

Lesmana, Marcelino Dennis, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syailendra. "Problematika Prkatik Kepailitan Di Indonesia." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 4, no. 2 (2024): 134–46. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/822>.

Lontoh, Rudy A., Denny Kailimang, and Benny Ponto. *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Pembayaran Utang*. Cetakan pe. Bandung: Alumni, 2001.

Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Edited by Tarmizi. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 8th ed. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. USA: Sage Publications, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.

Mulia, Degha, and Hasyry Agustin. "Mengenal Syarat Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan." BP Lawyers Counselors At Law, 2021. <https://bplawyers.co.id/2021/02/23/mengenal-syarat-pembuktian-sederhana-dalam-perkara-kepailitan/>.

Muljadi, Kartini, and Gunawan Widjaja. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. 2nd ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Nating, Imran. *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit : Edisi Revisi*. 5th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Panggabean, Henry P. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari : Upaya Penanggulangan Perkara Dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Parulian, Hendra, Handar Subhandi Bakhtiar, and Atik Winanti. "Analisis Perbandingan Syarat Jumlah Utang Dalam Permohonan Kepailitan Di Indonesia Dengan Malaysia Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Debitor." *Aliansi Jurnal Hukum Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2025): 312. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.998>.

Putra, Denta Asmara. "Keabsahan Penggunaan Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Menjual Dalam Konstruksi Hubungan Utang Piutang." Universitas Islam Indonesia, 2023.

Redaksi HukumID. "SEMA No. 3 Tahun 2023, Mahkamah Agung Cawe-Cawe Di Sektor Properti?" HukumID, 2024. <https://hukumid.co.id/sema-no-3-tahun-2023-mahkamah-agung-cawe-cawe-di-sektor-properti/>.

Rizki, Dwi. "PT Prima Kencana Dinyatakan Pailit, Paguyuban Konsumen Siap Lanjutkan Pembangunan Apartemen T Plaza." *WartaKota (Tribunnews)*, 2020. <https://wartakota.tribunnews.com/2020/06/19/pt-prima-kencana-dinyatakan-pailit-paguyuban-konsumen-siap-lanjutkan-pembangunan-apartemen-t-plaza>.

Rudi, Rifdah. "Subjek Hukum Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana." Hukumonline, 2014. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana-lt52bdf2508616/>.

Rumokoy, Donald albert, and Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*. Edited by Kanisius. Yogyakarta, 2020.

Salam, Moch. Faisal. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Siagian, Andhika. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Satuan Rumah Susun (Dalam Angsuran) Ketika Developer Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Putusan

Nomor 77/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst).” Universitas Brawijaya, 2021.

Simanjuntak, Ricardi. “Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan.” In *Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya*, edited by Emmy Yuhassarie, 52. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004.

Simanungkalit, Wigrha Tommy Boy. “Analisis Yuridis Perubahan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Dalam Putusan Nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.,” 2019, 25.

Sitoresmi, Ayu Rifka. “Developer Adalah Instansi Pembuat Perumahan, Ketahui Tanggung Jawabnya.” *Liputan6.com*, 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/5293974/developer-adalah-instansi-pembuat-perumahan-ketahui-tanggung-jawabnya>.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Sriwidodo, Joko, and M.S. Tumanggor. *Perkembangan Hukum Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia*. Edited by Emanuella Regina. 1st ed. Yogyakarta: Kepel Press, 2024.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. 19th ed. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sulaiman, Robinton, and Joko Prabowo. *Lebih Jauh Tentang Kepailitan: Tanggung Jawab Komisaris, Direksi, Dan Pemegang Saham Terhadap Perusahaan Pailit (Tinjauan Yuridis)*. Karawaci: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2000.

Sunarmi. *Prinsip Keseimbangan : Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.

Susetyo, Herman. “Kedudukan Firma Dan CV Beserta Anggota Sekutunya Dalam Hukum Kepailitan.” *Law, Development & Justice Review* 4, no. 1 (2021): 70–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i1.11958>.

Tejaningsih, Titik. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit.” Univeristas Islam Indonesia, 2016. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9437>.

Wijaya, Andika, and Wida Peace Ananta. *Hukum Acara Pengadilan Niaga: Practical Guide to The Commercial Court*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Wiradipradja, E.Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. 2nd ed. Bandung: CV Keni Media, 2016.

Yani, Ahmad, and Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*. 4th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Yasa, I Wayan, and Echwan Iriyanto. “Kepastian Hukum Dan Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata.” *Jurnal Rechtsens* 12, no. 1 (2023): 37. <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i1.1957>.

Yasin, Muhammad. “Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan.” *Hukumonline*, 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074/>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1344 K/Pdt.Sus-Pailit/2024.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt.Pst.